

MANAJEMEN FINANSIAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Lidia Olga^{1*}, Faiq Nurraihan²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung, Lampung, Indonesia

Lidia.olga@sttnlampung.ac.id¹, faiq.nurraihan29@gmail.com²

*Corresponding author: faiq.nurraihan29@gmail.com

Abstrak: Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah berdampak signifikan pada pengelolaan pendidikan di Indonesia. Otonomi membuka peluang bagi satuan pendidikan untuk mengelola sekolah secara mandiri, terutama dalam pengembangan kurikulum dan pendanaan. Namun, di sisi lain, otonomi juga menjadi ancaman jika sekolah tidak siap, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun keuangan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah sangat tergantung pada kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah yang kompeten dalam manajemen keuangan sekolah menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa guru dan karyawan dapat menjalankan pendidikan dengan kualitas yang optimal.

Kata Kunci: Otonomi; SDM; Keuangan; Pendidikan

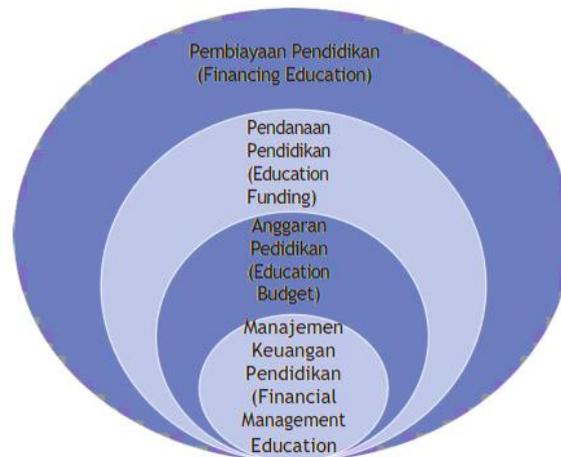
Abstract: Law No. 22 of 1999 regarding regional autonomy has had a significant impact on education management in Indonesia. Autonomy opens opportunities for educational units to manage schools independently, especially in curriculum development and funding. However, on the other hand, autonomy also poses a threat if schools are not prepared, both in terms of human resources (HR) and finance. Therefore, the success of school financial management depends heavily on the competence of the school principals. Competent school principals in school financial management are the key to ensuring that teachers and staff can deliver education with optimal quality.

Keywords: Autonomy; HR; Finance; Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik, dengan tujuan agar mereka memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Keberhasilan suatu sistem pendidikan sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidik dan sarana-prasarana belajar yang memadai. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, kecukupan pendanaan menjadi faktor krusial. Namun, penting untuk diingat bahwa jumlah sumber pendanaan yang melimpah tidak selalu menjamin kualitas pendidikan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen keuangan pendidikan memegang peranan vital dalam mengelola dana dengan efisien sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Mujammil Qomar mendefinisikan keuangan sebagai elemen kunci dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, manajer lembaga pendidikan akan kesulitan untuk mengambil langkah-langkah signifikan dalam upaya memajukan lembaga yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1, yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut, pasal 49 ayat 3 menyatakan bahwa dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Konsep Manajemen Keuangan di Dunia Pendidikan

Meskipun ketersediaan dana yang melimpah adalah hal positif, namun pengelolaannya yang kurang optimal dapat menyebabkan pemborosan, ketidaksesuaian belanja dengan rencana, bahkan potensi penyelewengan dana. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, kesesuaian belanja sekolah dengan rencana, pengawasan, dan pertanggungjawaban perlu dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, jurnal ini akan mendiskusikan secara mendalam mengenai konsep manajemen keuangan, ruang lingkup manajemen keuangan, dan sumber-sumber keuangan pendidikan. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini, diharapkan lembaga pendidikan dapat mengelola keuangan mereka secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan pandangan yang bersifat global, umum, dan menyeluruh sebagai hasil implementasi berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program terkait dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan sumber daya pendidikan lainnya. Semua ini secara langsung berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sumber daya pendidikan, yang dianggap sebagai instrumen produksi atau proses yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama ditentukan oleh faktor keuangan. Konsep ini bukanlah sesuatu yang baru dalam pandangan manusia terhadap berbagai aktivitas. Sejak zaman dahulu, uang dianggap memiliki peran strategis, sebagaimana diungkapkan dalam peribahasa bijak yang menyatakan, "uang memang bukan segalanya, tapi jangan lupa, segalanya butuh uang." Hal ini juga berlaku dalam mengelola lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan memiliki aspirasi untuk mencapai tingkat keunggulan, kualitas, reputasi yang baik, dan prestasi lainnya. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dukungan finansial yang memadai menjadi krusial. Keyakinan banyak pihak, termasuk saya, adalah bahwa mencapai target tinggi atau menjadi yang terbaik dalam pendidikan tidak mungkin terwujud tanpa dukungan

keuangan yang memadai, terlebih lagi jika tidak didukung oleh pengelolaan yang baik.

Oleh karena itu, sumber daya keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan pencapaian dan terwujudnya target lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara profesional, adil, memadai, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk meraih prestasi dan keberlanjutan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya keuangan mereka dengan bijak agar dapat memenuhi kebutuhan, mencapai tujuan, dan memberikan layanan pendidikan yang optimal.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode literatur untuk mendalami aspek "Manajemen Finansial dalam Konteks Pendidikan". Tahap awal melibatkan identifikasi dan seleksi literatur terkait, yang mencakup buku teks, jurnal akademis, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan manajemen finansial dan pendidikan. Pencarian literatur akan dilakukan secara sistematis melalui basis data akademis seperti PubMed dan Google Scholar. Selanjutnya, data literatur akan dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat untuk mengungkapkan temuan-temuan utama yang terkait dengan prinsip-prinsip manajemen finansial di lembaga pendidikan. Temuan-temuan ini akan dikelompokkan berdasarkan tema, seperti kebijakan keuangan pendidikan, sumber-sumber pendanaan, peran pemerintah, dan inovasi dalam manajemen finansial. Proses sintesis temuan akan menjadi dasar penyusunan laporan literatur yang komprehensif, memberikan pemahaman mendalam terhadap kerangka konseptual, dan mengembangkan pandangan kritis terhadap isu-isu kunci yang terkait. Penelitian ini akan mematuhi etika penelitian dengan memastikan pengutipan yang akurat dan menghindari plagiarisme, serta menyajikan hasil penelitian dengan integritas dan transparansi sesuai standar keilmuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI MANAJEMEN FINANSIAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Manajemen keuangan pendidikan, atau yang sering disebut sebagai pembiayaan pendidikan, merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengadaan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Nanang Fattah menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, hingga supervisi pendidikan. Sementara itu, Sulistiyorini memberikan konsep manajemen keuangan dalam arti sempit yang mencakup pembukuan, dan dalam arti luas, mencakup pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam konteks manajemen keuangan sekolah, David Wijaya menambahkan bahwa ini melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan melibatkan sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Menurut Bafadal, fungsi manajemen keuangan mencakup perencanaan anggaran tahunan, pengadaan anggaran, pendistribusian anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan keuangan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. Pendapat dari Agustinus Hermino menguraikan bahwa fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas, yaitu menyediakan informasi kuantitatif sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut Sulistiyorini, fokus manajemen keuangan pendidikan adalah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran, serta memfungsikan masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam mengelola sekolah. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep dan implementasi manajemen keuangan pendidikan menjadi krusial untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.

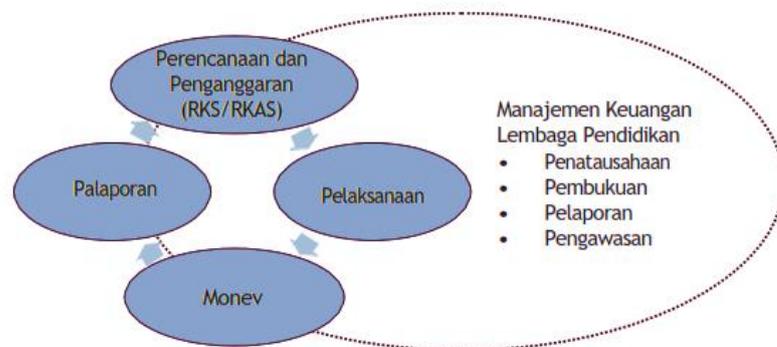
Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memiliki urgensi yang tinggi untuk diaplikasikan, terutama mengingat sifat normatif dan sosiologis dari entitas sekolah yang tidak bersifat profit. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan setiap orang tua siswa untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dana lembaga pendidikan digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang profesional. Konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: pertama, adanya tuntutan untuk mengelola penggunaan dana dengan transparan dan akuntabel; kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya; ketiga, meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun; keempat, mencari sumber-sumber pendanaan yang kreatif; dan kelima, menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional (Santoso, U. & Pabelum, Y.J., 2008).

Pentingnya manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan semakin terasa dalam konteks implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di tengah hiruk-pikuk otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Hal ini menuntut kemampuan lembaga pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Wijaya, D., 2009). Dengan kata lain, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tidak hanya sekadar prinsip-prinsip

teoretis, tetapi juga menjadi hal yang sangat konkrit dan relevan dalam praktek pengelolaan pendidikan.

Pembiayaan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan bukan hanya sekedar komponen pendukung, tetapi merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi faktor produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan yang optimal. Studi yang dilakukan oleh Sudarmanto (2009, 1) mengungkapkan bahwa biaya sosial dan biaya pribadi yang digunakan untuk membiayai pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran dan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, setiap layanan pendidikan memerlukan alokasi biaya yang memadai, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bukanlah sekedar konsep teoretis, melainkan merupakan suatu rangkaian aktivitas konkret yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik akan memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk memahami secara mendalam dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan guna meningkatkan mutu layanan pendidikan yang diberikan.



Gambar 2. Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan

Dari segi kegiatan, manajemen keuangan pendidikan melibatkan aspek penganggaran dan pembiayaan pendidikan yang mencakup upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, penggunaan dana, pelaporan, pemeriksaan, serta pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Penjelasan sejalan disampaikan oleh Abdullah (2011;2), yang mendefinisikan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga mencapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Dalam konteks lebih operasional, Rusmawati, Vivi (2013) merinci uraian tugas dalam kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan. Tindakan ini mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pada lembaga pendidikan. Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan tidak hanya mencakup pengaturan dana, tetapi juga melibatkan langkah-langkah praktis untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif.

Dari paparan di atas, tergambar bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan pengaturan keuangan lembaga pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Semua langkah ini diarahkan untuk memastikan bahwa organisasi atau institusi pendidikan dapat beroperasi dengan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Pentingnya manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan terletak pada kemampuannya untuk menciptakan suatu sistem yang tidak hanya mengelola sumber daya finansial dengan bijak, tetapi juga mengoptimalkan penggunaannya guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang optimal. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya keuangan tidak hanya sebatas pada pengumpulan dan penggunaan dana, tetapi juga mencakup pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian terus-menerus agar tetap sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas finansial lembaga pendidikan, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep ini secara menyeluruh, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan setiap aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan strategis hingga implementasi praktis, sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara efisien dan berkelanjutan.

LINGKUP MANAJEMEN FINANSIAL DALAM PENDIDIKAN

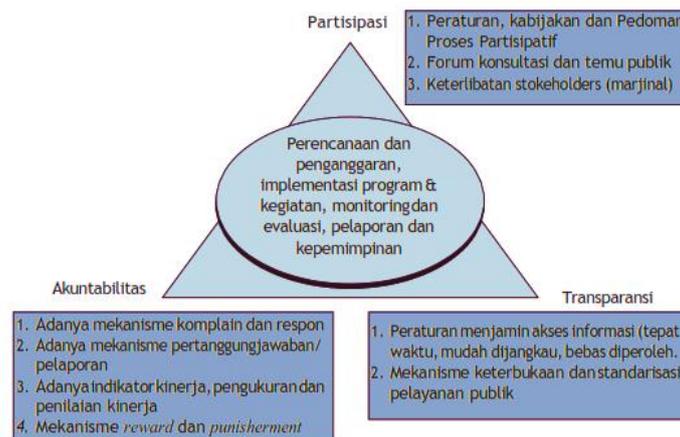
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arwidayanto dan rekan-rekan, ditemukan bahwa ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan mencakup empat aspek kegiatan utama. Pertama, terdapat kegiatan penyusunan atau perencanaan anggaran, yang melibatkan proses perencanaan keuangan yang terstruktur untuk memastikan alokasi dana yang tepat pada setiap aspek pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Aspek kedua dari ruang lingkup ini adalah pembukuan atau accounting, yang merinci pencatatan secara sistematis segala transaksi keuangan yang terkait dengan operasional lembaga pendidikan. Pembukuan ini penting untuk memahami aliran dana, mengelola pengeluaran, dan menyediakan basis informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya, aspek pemeriksaan menjadi elemen kunci dalam ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Melalui kegiatan pemeriksaan, lembaga pendidikan dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan, mencegah potensi risiko keuangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Terakhir, pertanggungjawaban menjadi tahap penting dalam ruang lingkup ini. Setelah kegiatan perencanaan, pencatatan, dan pemeriksaan, tahap pertanggungjawaban melibatkan evaluasi terhadap penggunaan dana dan pemberian laporan yang jelas kepada pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Melalui empat aspek kegiatan ini, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang ruang lingkup ini sangat penting bagi praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelangsungan dan kualitas pendidikan yang optimal.



Gambar 3. Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Perencanaan Anggaran

Budgeting merupakan suatu kegiatan yang mencakup beberapa langkah kritis dalam mengelola keuangan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan, di mana pihak pengelola keuangan perlu secara jelas menentukan target yang ingin dicapai. Selanjutnya, menentukan prioritas menjadi tahap penting, di mana pengelolaan keuangan harus memilih tujuan yang memiliki dampak terbesar atau urgensi yang lebih tinggi.

Proses berikutnya adalah menjabarkan tujuan menjadi penampilan operasional yang dapat diukur. Hal ini melibatkan perinciannya secara rinci agar pengukuran dan evaluasi dapat dilakukan dengan tepat. Menganalisis alternatif menjadi tahap selanjutnya, di mana pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk mencapai tujuan harus dipertimbangkan dengan seksama. Dalam menganalisis cost effectiveness, pengelola keuangan harus memastikan bahwa penggunaan dana mencapai hasil maksimal dengan biaya yang efisien.

Selanjutnya, tahap pencapaian tujuan melibatkan implementasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Proses ini juga memerlukan analisis lanjutan untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelola keuangan kemudian membuat rekomendasi alternatif pendekatan jika diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penyusunan anggaran, pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu berasal dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan dana harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, prinsip-prinsip hemat sesuai dengan kebutuhan, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, serta tidak menggunakan dana untuk keperluan di luar kegiatan belajar dan mengajar menjadi pedoman yang harus dipegang teguh.

Dengan memperhatikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip tersebut, proses budgeting dapat dijalankan dengan efektif, memberikan arah yang jelas, dan memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pembukuan

Pembukuan dalam konteks manajemen keuangan pendidikan melibatkan dua aspek kritis yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pertama-tama, pengurusan berkaitan dengan kewenangan dalam menetapkan kebijakan terkait penerimaan dan pengeluaran dana. Aspek ini seringkali disebut sebagai kepengurusan tata usaha, di mana kepemimpinan dalam menentukan kebijakan keuangan menjadi esensial. Kedua, kepengurusan ini dilanjutkan dengan tindak lanjut terhadap urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam rangka pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh staf yang dipercayakan untuk mengelola keuangan sekolah.

Pentingnya pembukuan dalam manajemen keuangan sekolah menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap beberapa hal yang esensial. Adanya buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan neraca percobaan menjadi hal-hal yang perlu dikenalkan kepada staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Buku pos, sebagai contoh, berfungsi sebagai catatan utama transaksi keuangan, sedangkan faktur digunakan sebagai bukti resmi terkait transaksi. Buku kas menjadi instrumen vital dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci, sedangkan lembar cek merupakan dokumen yang mencatat transaksi melalui cek. Jurnal, sebagai catatan kronologis, memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan yang akurat.

Sementara itu, buku besar menjadi bukti pencatatan akhir yang merinci setiap transaksi keuangan. Buku kas pembayaran uang sekolah mencatat seluruh pembayaran yang diterima dari siswa atau orang tua murid, sedangkan buku kas piutang mencatat setiap kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Neraca percobaan, sebagai rangkuman akhir, memberikan

gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan sekolah pada suatu periode tertentu.

Dengan memperkenalkan dan memahami staf terkait pada berbagai unsur pembukuan keuangan sekolah, diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan ketelitian dalam pengelolaan dana sekolah. Pembukuan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Pemeriksaan

Pemeriksaan, atau auditing, adalah suatu kegiatan yang secara khusus menangani pertanggungjawaban terkait penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam ranah auditing, terdapat beberapa bentuk yang dapat dikenali dan dijelaskan secara terperinci guna memahami tujuan serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan suatu lembaga atau organisasi.

Pertama, kita mengenal pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini difokuskan untuk menilai apakah seluruh laporan keuangan suatu entitas merupakan informasi yang telah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, auditor akan meneliti setiap aspek laporan keuangan, termasuk pencatatan transaksi, kelayakan estimasi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi informasi keuangan yang disajikan, yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang informasional dan tepat.

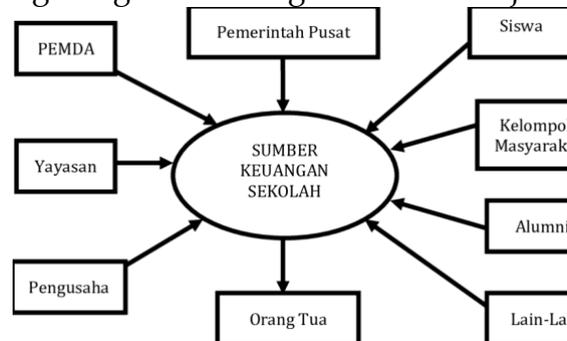
Selanjutnya, ada pula pemeriksaan operasional, yang berfokus pada evaluasi keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari prosedur atau metode operasional suatu organisasi. Tujuan dari pemeriksaan operasional adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari berbagai proses operasional yang dilakukan oleh organisasi. Auditor akan melibatkan diri dalam penelitian mendalam terhadap bagaimana suatu organisasi menjalankan aktivitasnya, dengan tujuan mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemeriksaan atau auditing bukan hanya terbatas pada pengawasan keuangan semata, tetapi juga mencakup evaluasi operasional suatu entitas. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan dapat tercipta kontrol internal yang lebih kuat, mencegah kecurangan atau penyelewengan, serta memberikan dasar bagi perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan dalam manajemen keuangan dan operasional organisasi. Dengan demikian, keberadaan pemeriksaan memiliki peran sentral dalam menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan suatu entitas di dalam dunia bisnis dan keuangan.

SUMBER - SUMBER KEUANGAN PENDIDIKAN

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1, dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata. Sumber keuangan pendidikan, seperti dikemukakan oleh Sulistiyorini, dapat digolongkan secara garis besar menjadi tiga kategori utama.



Gambar 4. Sumber - Sumber Keuangan Pendidikan

Pertama, kontribusi dari pemerintah menjadi pilar utama dalam pendanaan pendidikan. Pemerintah dapat bersumbangsih baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, atau dalam beberapa kasus, keduanya. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna menunjang keberlangsungan operasional lembaga pendidikan. Keterlibatan pemerintah sebagai sumber utama dana menciptakan kepastian dalam pembiayaan pendidikan dan menegaskan peran negara dalam memberikan akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, peran orang tua siswa sebagai penyandang dana pendidikan menjadi unsur penting dalam pembiayaan pendidikan. Kontribusi orang tua siswa bisa meliputi pembayaran uang sekolah, sumbangan sukarela, atau dukungan finansial lainnya. Keterlibatan orang tua tidak hanya sebagai kewajiban finansial semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam pendidikan anak-anak mereka.

Ketiga, masyarakat juga menjadi sumber keuangan pendidikan, baik dalam bentuk keterlibatan yang bersifat mengikat, seperti melalui dana zakat atau wakaf, maupun yang bersifat tidak mengikat, seperti partisipasi dalam kegiatan penggalangan dana atau program sukarelawan. Keterlibatan masyarakat dalam pendanaan pendidikan menunjukkan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan bersama.

Dengan mempertimbangkan tiga kategori sumber keuangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendanaan pendidikan merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat secara bersama-sama membentuk fondasi yang kuat untuk mendukung kelancaran dan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan bukanlah tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama dalam membangun generasi yang terdidik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

ASAS-ASAS PENGELOLAAN FINANSIAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN

Pengelolaan keuangan dalam konteks pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan, konsep-konsep manajemen keuangan, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, menjadi landasan utama yang harus diterapkan secara bijak. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan akademis, tetapi juga melibatkan aspek keuangan yang dikelola secara efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendalami masing-masing konsep tersebut, membahas implikasinya dalam manajemen keuangan pendidikan, serta mengidentifikasi prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.

Dengan demikian, rincian berikut akan menjelaskan secara sistematis mengenai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan dampak setiap konsep dalam mencapai keunggulan lembaga pendidikan.

Transparansi

Transparansi, yang berarti keterbukaan, mencerminkan suatu konsep yang esensial dalam manajemen keuangan pendidikan. Konsep ini menuntut adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan, mulai dari sumber-sumber pendanaan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Keberadaan transparansi sangat penting bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap aspek keuangan ini. Adanya transparansi juga dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan.

Tidak hanya itu, transparansi juga berdampak positif pada tingkat kepercayaan antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Fasilitas akses yang mudah terhadap informasi keuangan pendidikan, baik melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dipublikasikan di papan pengumuman, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU), maupun melalui situs web resmi lembaga pendidikan, memberikan kemudahan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memahami asal-usul pendanaan serta pemanfaatannya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan mencerminkan kondisi di mana seseorang dinilai oleh pihak lain berdasarkan kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengartikan bahwa penggunaan keuangan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perencanaan dan regulasi yang berlaku, pihak sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana secara bertanggung jawab.

Terdapat tiga syarat utama untuk menciptakan akuntabilitas publik yang efektif, yakni adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal partisipasi mereka dalam berbagai komponen sekolah, adanya standar kinerja sekolah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, serta partisipasi untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan proses yang cepat.

Efektivitas

Efektivitas, dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Definisi lebih mendalam dari Garner dalam Kompri menyatakan bahwa efektivitas tidak hanya berhenti pada pencapaian tujuan, tetapi juga mencakup hasil kualitatif yang terkait dengan tujuan dan visi misi lembaga. Manajemen keuangan dapat dianggap efektif jika kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas guna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, serta kualitas hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi

Efisiensi, pada dasarnya, mengacu pada perbandingan optimal antara masukan (input) dan keluaran (output), atau daya dan hasil. Dalam konteks pendidikan, efisiensi dapat diukur dari penggunaan optimal waktu, tenaga, dan biaya dalam penyelenggaraan kegiatan. Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan prinsip keadilan mencakup pendanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Prinsip efisiensi menuntut perbandingan yang optimal antara pemasukan dan pengeluaran, sedangkan prinsip transparansi menekankan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Prinsip akuntabilitas publik menuntut agar penggunaan keuangan sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, manajemen keuangan pendidikan dapat mencapai tingkat efisiensi yang maksimal.

PEKERJAAN MANAJEMEN KEUANGAN

Menurut Djoened Rastavara, dalam praktik manajemen keuangan, prinsip pemisahan tugas menjadi otorisator, ordonator, dan bendaharawan sangat ditekankan. Otorisator merujuk pada pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sebaliknya, ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memberikan perintah pembayaran atas tindakan yang dilakukan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, bendaharawan bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolah, memegang peran ganda sebagai otorisator dan ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, kepala sekolah tidak diperbolehkan menjalankan fungsi bendahara karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal. Sebaliknya, fungsi bendahara dijalankan oleh individu yang ditunjuk, yang melibatkan tugas sebagai bendaharawan sekaligus ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Dalam konteks manajemen keuangan sekolah, manajer keuangan memiliki tanggung jawab luas yang melibatkan seluruh siklus keuangan sekolah. Tugas utama manajer keuangan meliputi perencanaan perkiraan, fokus pada keputusan investasi dan pembiayaan, menjalin kerjasama dengan pihak lain, serta mengelola penggunaan keuangan dan mencari sumber pendanaan. Semua langkah ini diambil dengan pertimbangan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, yang merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan pendidikan.

SIMPULAN

Manajemen keuangan sekolah memegang peranan sentral dalam menentukan kelangsungan operasional pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Definisi manajemen keuangan sekolah melibatkan rangkaian kegiatan administrasi dan pengaturan keuangan, mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Sebuah sistem manajemen keuangan yang terorganisir dengan baik bukan hanya mampu menyediakan dana untuk membiayai kegiatan sekolah, melainkan juga memiliki dampak positif terhadap prestasi sekolah, peningkatan kinerja guru, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan manajemen yang efektif, sekolah dapat meraih kemandirian pendanaan dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip manajemen keuangan yang telah teruji, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Keempat prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.

Selain mematuhi prinsip-prinsip dasar, para pengelola keuangan sekolah juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ruang lingkup manajemen keuangan. Ini melibatkan keterampilan dalam perencanaan anggaran, pencarian sumber dana sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kemahiran dalam setiap aspek ini sangat penting agar kebijakan keuangan sekolah dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan kemandirian finansial sekolah.

REFRENSI

- Widodo, T., Muhammad, I., Darmayanti, R., Nursaid, N., & Amany, D. A. L. (2023). Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital: Sebuah kajian pustaka. *Indonesian Journal of Educational Management and Leadership*, 1(2), 146-167.
- Zurna, H. H. P. B. (2023). Manajemen Keuangan Sekolah Menengah Kejuruan: Kajian Literatur. *Journal of Education Research*, 4(2), 654-661.
- Mawaddah, M., Mamlu'ah, A. W., Darmansyah, R., Barokah, A., Yulistiana, I., Liklikwatil, N., ... & Hasanah, N. (2023). *MANAJEMEN PENDIDIKAN*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riyadi, S., Nuswantoro, P., Merakati, I., Sihombing, I., Isma, A., & Abidin, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pendidikan Inklusif Di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 6(3), 130-137.
- Muhajir, N. M. N., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4684-4689.
- Untung, S. (2023). MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM. *Khazanah Pendidikan*, 17(2), 130-138.
- Nurdiana, D. D., & Nadifah, N. I. (2023). Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Management Research*, 1(1), 41-47.
- Elshifa, A., Perdana, M. A. C., Matiala, T. F., Yasin, F., & Mokodenseho, S. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Dukungan Kelembagaan terhadap Keberhasilan Usaha Mikro. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 123-134.
- Sipayung, S. B., & Hayati, I. (2023). PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA TADIKA INTEGRASI GENIUS KHALIFAH SELANGOR, MALAYSIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 76-81.
- Sapitri, D., Mujahidin, E., & Andriana, N. (2023). EVALUASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 86-107.
- Pahruzi, R. A. (2023). MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN SDM MELALUI PENGALOKASIAN DANA KHUSUS (PELATIHAN) DI MTS SYAFA'ATURRASUL TELUK KUANTAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 25-32.
- Mustofa, H., & Kaswari, H. (2023). STRATEGI MANAJEMEN DAN OPTIMALISASI PERAN MASJID AN-NUUR DALAM LAYANAN PENDIDIKAN ISLAM: Sebuah Studi Kasus Kualitatif. *An-Nuur*, 13(2).
- Hidayati, S., Hendi, H., Karoma, K., & Astuti, M. (2023). INOVASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 44-54.

- Yadi, S., Nurrochim, N., & Ratnaningsih, S. (2023). Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan SIT Citra Az-Zahra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(7), 748-756.
- Gaol, N. T. L. (2023). *Teori dan Model Manajemen Pendidikan: Sebuah Kajian Fundamental*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Yulia, N. K. T. (2023). PENGEMBANGAN SIMATREN (SISTEM INFORMASI PESANTREN) DALAM MENGELOLAH MANAJEMEN INTERNAL PESANTREN DI PP RAUDHATUL ULUM 1 GANJARAN-MALANG. *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan dan Pendidikan*, 5(2), 34-45.
- Wulandari, A., Hardianto, H., Setyanto, E., & Arifanisa, A. (2023). Pengelolaan Keuangan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Pemberdayaan Alumni (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1362-1375.
- Belmo, K. (2023). Efektivitas Manajemen Keuangan Sekolah pada SMK Swasta Lamaholot Larantuka Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(1), 01-12.
- Hasanuddin, H., & Jamrizal, J. (2023). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengeluaran, Operasional dan Investasi Terhadap Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(2), 616-624.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas. *TADBIRUNA*, 3(1), 43-55.
- Miranti, M. (2023). ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATAN MUTU LULUSAN DI SMAN 2 HALONG KABUPATEN BALANGAN. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 3(2), 295-301.
- Amri, S., & Rizal, S. (2023). Lokakarya Badan Layanan Umum Daerah Sebagai Kegiatan Pengabdian untuk Kemandirian Organisasi. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 734-740.